



**Peran Rezim *Trans Pacific Partnership* (TPP) dalam Mempengaruhi Kepatuhan Negara Anggota Terhadap Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Internasional
(Studi Kasus : *Software Piracy* di Vietnam Tahun 2007-2010)**

Adinda Gusty Rachmah

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Intellectual Property Right is a sensitive issue for developing country such as Vietnam. Accession to the Trans Pacific Partnership (TPP) at 2008 and approval TRIPS Agreement makes Vietnam engaged in a system to guarantee the protection of intellectual property rights. TPP is a free trade agreement that is projected to be a 'comprehensive and high standard free trade agreement' in the trans pacific region which aims to liberalize trade in almost all sectors of goods and services. This research aim to obtain an overview and analysis of the Trans Pacific Partnership (TPP) and its relation to the crime of intellectual property rights, explaining the implementation of TPP in Vietnam in overcoming intellectual property rights. International Cooperation theory and International Regime theory are used to explain the fact and phenomenon and also as base in building the arguments to answer research questions. Built arguments are sourced from conference proceedings, report, protocols, conventions and other literature sources which are processed in qualitative way based on the theories which resulted an explanative argument as a research answer. The result of this study is Vietnam has joined the TPP but in its implementation of intellectual property rights were far from compliance with the TRIPS Agreement. Vietnam has not been able to comply with the commitments of this agreement because it could not provide sufficient protection and strict law enforcement towards the infringements.

Keywords :Trans Pacific Partnership (TPP), Intellectual Property Rights (IPR), Vietnam, Software Piracy

PENDAHULUAN

Dinamika internasional ditandai oleh kuatnya kecenderungan globalisasi di segala bidang sehingga mengharuskan setiap negara untuk benar-benar memikirkan posisi yang tepat, agar tidak tertinggal dari dinamika tersebut, namun juga tidak menjadi korban dari arah perkembangan global yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya (Beerkens, 2002). Memasuki abad ke-21, kawasan Asia-Pasifik terdapat perkembangan signifikan yang menyebabkan berubahnya tatanan geopolitik dan geoekonomi dunia. Salah satu strategi untuk mengembangkan tatanan geoekonomi dunia yaitu melalui perjanjian *Trans Pacific Partnership* (TPP). TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang diproyesikan untuk menjadi sebuah '*comprehensive and high standard free trade agreement*' di area Trans Pasifik yang bertujuan untuk meliberalisasikan perdagangan di hampir semua sektor barang dan jasa termasuk hal-hal di luar komitmen yang telah diatur dalam *World Trade Organization* (WTO) (Fergusson, Cooper, Jurenas, & Williams, 2013). Jika disahkan, TPP akan menghilangkan 11.000 pos tarif, dan dengan 30 bab yang tengah dinegosiasikan, TPP

berpotensi mampu menjadi percontohan bagi pakta perdagangan masa depan di antara negara-negara APEC (Fergusson & Vaughn, 2011).

Perjanjian ini bersifat komprehensif, yang meliputi liberalisasi di semua sektor menyangkut barang, jasa dan investasi, dengan sifat terjadwal dan mengikat secara legal (*legally binding*). Isu-isu lain, yang biasa disebut isu “WTO Plus” yang dibahas dalam TPP adalah *Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kebijakan kompetisi (*competition policy*), belanja pemerintah (*government procurement*), dan fasilitasi perdagangan. Terdapat 12 negara yang sedang menegosiasikan perjanjian TPP yaitu Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam (LEMHANAS RI, 2013).

Perkembangan teknologi ini semakin terlihat jelas dengan adanya era globalisasi, yang juga mengarah pada penyebaran yang luas bagi informasi komunikasi internasional. Dengan kata lain, masyarakat dunia sangat bergantung kepada teknologi komputer sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi agar dapat eksis di dunia internasional. Dapat dikatakan demikian, karena teknologi komputer saat ini juga telah banyak digunakan di setiap profesi, aktivitas komersial, dan industri, serta banyak organisasi baik lokal maupun internasional, yang mungkin akan menemukan kesulitan jika tanpa mengandalkan perangkat komputer (Bainbridge, 1993). Era globalisasi juga memberikan dampak pada meningkatnya kasus-kasus ilegal yang banyak terjadi di negara dunia ketiga, seperti adanya kasus pembajakan *software* yang terjadi di sebagian besar negara Asia seperti Vietnam, Cina, Indonesia, dan lain-lain. Vietnam sebagai salah satu negara yang sedang berkembang di Asia, juga mengalami hal yang sama, yaitu sebagai negara yang sedang memajukan negaranya, dengan berbagai kendala yang ada agar tidak ketinggalan dengan negara maju lainnya dan tidak terlepas dari masalah kurangnya pengetahuan mengenai teknologi (Mearian, 2001).

Berdasarkan data dari *the Business Software Alliance* (BSA), Vietnam tercatat sebagai negara yang tingkat pembajakan *software*-nya (*software piracy*) tertinggi di dunia sekitar 85% dan masuk kedalam 15 negara teratas yang memiliki pembajakan *software* tertinggi. Kejahatan ini sering terjadi karena masih kurangnya pematuhan hukum di Vietnam. Masalah pembajakan *software* ini sebenarnya tidak perlu terjadi, kalau saja pematuhan atau undang-undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat ditegakkan di setiap negara, termasuk Vietnam. Tetapi, banyak faktor pula yang menjadi alasan mengapa undang-undang tersebut terkesan diabaikan.

Vietnam menyadari bahwa integrasi dalam organisasi internasional sangat penting untuk menunjang pembangunan negara. Bergabung dalam organisasi ekonomi internasional membantu Vietnam membuka pasar bebas dan menyokong perdagangan bebas. Momentum bergabung dalam WTO dan TPP membawa peluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi Vietnam. Untuk menjamin keamanan HAKI, Vietnam layaknya negara berkembang lain juga turut berperan aktif dalam organisasi perdagangan internasional serta berkomitmen untuk melanjutkan integrasi ekonomi globalnya. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah *World Trade Organization* (WTO) dan *Trans Pacific Partnership* (TPP). Sebelum bergabung dalam WTO, Vietnam telah aktif dalam beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAKI. Namun perlu adanya kesadaran dari Vietnam agar regulasi HAKI dapat diperbaiki dan pelaksanaannya lebih spesifik.

Dampak yang signifikan terlihat setelah Vietnam bergabung dalam WTO dan TPP. Dimana pada tahun 2010 tingkat pembajakan perangkat lunak komputer pribadi (PC) mengalami penurunan dua persen menjadi 83%. Hal ini merupakan penurunan pertama setelah tiga tahun berturut-turut tingkat pembajakan tidak berubah sebesar 85% pada tahun 2007-2009. Dao Anh Tuan, juru bicara BSA mengatakan dalam pernyataannya bahwa kemajuan ini adalah hasil dari upaya besar yang dilakukan oleh Vietnam dalam beberapa

tahun terakhir. Namun, untuk mendapatkan tingkat pembajakan perangkat lunak sebanyak 60% pemerintah Vietnam masih harus bekerja lebih keras (Vietnam Breaking News, 2016).

PEMBAHASAN

Trans Pacific Partnership

Trans Pacific Partnership (TPP) adalah sebuah kerjasama perdagangan bebas yang pertama kali muncul pada tahun 2005 dengan nama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement* (TPSEP). TPSEP ini diprakarsai oleh empat negara di kawasan Asia Pasifik yaitu Singapura, Chili, Selandia Baru, dan Brunei Darussalam (dikenal dengan sebutan P4). Perkembangan P4 baru menjadi beritanya terutama media-media di seluruh dunia bersamaan dengan saat Amerika Serikat memutuskan masuk dalam P4 pada masa pemerintahan George W. Bush di bulan September 2008. Masuknya AS ini menjadi hal yang penting bagi TPSEP karena secara signifikan meningkatkan daya tarik institusi tersebut, mengingat AS sendiri tercatat sebagai perekonomian terbesar di dunia.

Pada Desember 2008, Australia, Peru dan Vietnam juga menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan P4. Pada Oktober 2010, kerjasama ini berganti nama menjadi *Trans Pacific Partnership* (TPP), yang menandai putaran negosiasi baru dan merupakan versi pengembangan dari TPSEP. Ditahun yang sama, Malaysia secara resmi bergabung pula sebagai negara anggota kesembilan dalam TPP. Kanada, Jepang dan Meksiko kemudian melakukan pendekatan untuk dapat bergabung dalam TPP dan resmi menjadi anggota TPP pada Desember 2012. Di bawah *Liberal Democratic Party* (LDP) yang terpilih pada Maret 2013, Jepang kemudian memulai konsultasi bilateral untuk bergabung dalam TPP, hingga pada akhirnya Jepang disambut sebagai partisipan baru pada bulan Juli 2013.

Terdapat 30 bab yang di negosiasikan dalam perjanjian TPP. Pada bab 18 TPP membahas mengenai hak kekayaan intelektual yang meliputi hak paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, bentuk lain dari kekayaan intelektual dan penegakan mengenai hak kekayaan intelektual, serta negara-negara mana yang sepakat untuk ikut kedalam kerjasama tersebut. Pada bab ini akan memberikan kemudahan kepada perusahaan khususnya usaha kecil untuk mencari, mendaftar, dan melindungi hak-hak kekayaan intelektual di pasar perdagangan baru. Bab ini menetapkan standar paten berdasarkan perjanjian TRIPS WTO. Pada merek dagang, bab ini memberikan perlindungan terhadap merek dan tanda-tanda lain kepada pelaku bisnis dan individu agar dapat membedakan produk mereka di pasar. Bab ini juga membutuhkan transparansi dan proses mengenai pengamanan terkait HAKI agar dapat diakui dan dilindungi melalui perjanjian internasional.

Berdasarkan undang-undang mengenai HAKI, berikut ini merupakan beberapa jenis yang dilindungi hak cipta : karya sastra dan ilmiah, buku, ceramah, presentasi dan pidato, karya jurnalistik, karya musik, sinematografi, karya seni rupa terapan, fotografi, karya arsitektur, grafik, sketsa, peta, gambar, karya sastra dan kesenian rakyat, program komputer dan kompilasi data, perangkat lunak (*software*).

Kepatuhan Vietnam Terhadap Rezim TPP dan HAKI

Sebelum masuknya Vietnam ke dalam WTO, negara mengeluarkan banyak undang-undang dan peraturan baru untuk memperkuat perlindungan dan penegakan terhadap HAKI. Kini Vietnam telah menjadi anggota WTO sejak 2007 sehingga mengharuskan Vietnam untuk membentuk undang-undang mengenai HAKI yang selaras dengan perjanjian WTO, hal ini dilakukan agar ada perbedaan antara undang-undang di Vietnam dengan hukum di negara-negara maju lainnya. Perlindungan kekayaan intelektual adalah suatu bidang hukum yang berkembang paling cepat di Vietnam oleh karena itu undang-undang mengenai kekayaan intelektual terus dilakukan pembaharuan dan peningkatan. Perlindungan mengenai

industri properti pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981 yang berfokus pada hak moral daripada hak ekonomi. Pada tahun 1981 hingga 1989, perlindungan properti industri di Vietnam hanya memiliki efek administratif meskipun telah banyak sejumlah peraturan pemerintah yang telah di terbitkan seperti peraturan tentang merek dagang (tahun 1982), solusi utilitas (1988), desain industri (1988), lisensi properti industri (1988), dan hak cipta (1986). Namun tidak membuat pelanggaran terhadap HAKI itu berkurang.

Vietnam membagi sistem HAKI menjadi tiga bagian : Pertama, hak cipta yang dikelola oleh Kantor Hak Cipta Vietnam (*Copyright Office of Vietnam*). Kedua, hak milik industri atau *industrial property rights* di kelola oleh *National Office of Intellectual Property* (NOIP). Ketiga, hak atas varietas tanaman atau *rights to plants varietie* yang dikelola oleh kantor perlindungan varietas tanaman. Dari ketiga bagian tersebut yang memegang peran paling besar adalah NOIP, karena NOIP bukan hanya lembaga negara melainkan sebuah kantor *database* dengan menyediakan layanan konsultasi sebelum melakukan pengajuan hak cipta dan paten agar tidak terjadi perselisihan atau kesamaan terhadap penemuan lainnya (National Office of Intellectual Property of Vietnam).

Sumber hukum utama tentang hak cipta di Vietnam (Linh Thi Mai Nguyen, 2017) yaitu (1) *Civil Code* berisi ketentuan umum terkait dengan HAKI, (2) *Intellectual Property Law Of 2005* berisi definisi dan mekanisme secara terperinci mengenai perlindungan terhadap HAKI, (3) *Civil Procedure Code Of 2015 (CPC)* berisi prinsip-prinsip dasar dan prosedur untuk litigasi perdata, (4) *Penal Code Of 1999* berisi penetapan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Perjanjian TPP sudah dirancang sejak beberapa tahun yang lalu namun masih banyak yang harus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan saat negara anggota mengimplementasikan perjanjian tersebut. Dalam TPP hal mengenai HAKI dibahas dalam bab 18, dari 82 artikel terdapat 55 artikel yang di nilai kompeten dan sesuai dengan kerangka hukum Vietnam sedangkan 27 artikel lainnya di nilai tidak sesuai.

Dalam TPP transparansi di bidang HAKI ditetapkan dalam pasal 18.9 dan artikel lain dari perjanjian TPP, seperti pasal 18.73 dan pasal 18.45 dengan demikian masing-masing negara harus memiliki hukum, peraturan, prosedur, dan aturan administratif tentang perlindungan dan penegakan terhadap HAKI. Negara harus tunduk terhadap hukum yang berlaku dan dapat menyediakan informasi melalui internet atau publikasi terkait merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten dan hak varietas tanaman. Hal ini bertujuan agar publik dapat mengetahui apa saja hak-hak yang telah terdaftar pada tiap negara. Undang-undang teknologi informasi 2006 menyatakan dalam pasal 28 (2) bahwa situs-situs lembaga negara harus mempublikasikan dokumen hukum yang berisi data relevan seperti nama orang yang bertanggung jawab dan atas waktu penyelesaian prosedur. Dokumen hukum lainnya, seperti keputusan No. 64/2007/ND-CP tentang aplikasi teknologi informasi dalam lembaga negara. Keputusan No. 52/2015/ND-CP tentang basis data hukum nasional juga memuat ketentuan yang jelas tentang masalah ini.

Hukum Vietnam masih memiliki beberapa ketentuan yang tidak sesuai misalnya pasal 18.45 pada perjanjian TPP. Vietnam tidak memiliki ketentuan khusus mengenai kewajiban untuk menyediakan informasi dengan cara yang memadai dan terperinci seperti yang dipersyaratkan dalam pasal 18.45 dari perjanjian TPP. Untuk memenuhi persyaratan perjanjian TPP ini merupakan tantangan bagi lembaga manajemen negara terhadap HAKI. Mengenai *scent marks* (kekhasan aroma) terdapat pada pasal 18.18 perjanjian TPP yang menyatakan bahwa aroma dapat di daftarkan kedalam HAKI. Sementara pada pasal 72 UU IP Vietnam, salah satu syarat dalam pendaftaran HAKI harus terlihat dalam bentuk huruf, susunan kata dan gambar. Dengan kata lain, hukum Vietnam saat ini belum ada peraturan mengenai *scent marks*. Untuk mengimplementasikan komitmen TPP, undang-undang HAKI Vietnam perlu direvisi untuk memperluas cakupan perlindungan terhadap *scent marks*.

Perjanjian TPP menyediakan jangka waktu perlindungan terhadap beberapa objek IP lebih lama daripada yang ditetapkan oleh hukum Vietnam dan perjanjian TRIPS. Berdasarkan perjanjian TPP, perlindungan pekerjaan, kinerja atau rekaman suara tidak boleh lebih pendek dari usia pengarang, dan 70 tahun setelah kematiannya. Sedangkan pada hukum Vietnam dan perjanjian TRIPS adalah seluruh usia penulis ditambah 50 tahun setelah kematiannya. Perjanjian TPP mengharuskan para pihak untuk menetapkan jangka waktu perlindungan setidaknya 10 tahun. Sedangkan berdasarkan hukum Vietnam hanya diberikan selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pemohon diberikan lisensi. Analisis di atas menunjukkan bahwa sejumlah komitmen HAKI dalam perjanjian TPP lebih tinggi daripada perjanjian TRIPS. Oleh karena itu, penegakan ketentuan HAKI dari perjanjian TPP mengharuskan Vietnam untuk merevisi undang-undangnya dan meningkatkan efektivitas kegiatan lembaga penegak HAKI.

Selain Vietnam memiliki Kantor Nasional Kekayaan Intelektual (NOIP) atau Kantor Hak Cipta Vietnam (COV), Vietnam juga memiliki sistem organisasi terhadap hak cipta. Empat organisasi tersebut adalah *The Vietnam Literary Copyright Center (VLCC)*; *The Recording Industry Association of Vietnam (RIAV)*; *The Vietnam Center for Protection of Music Copyright (VCPMC)* and *The Vietnam Reproduction Rights Organization (VIETRRO)*. Jenis dari organisasi ini adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba. Atas nama pemilik hak, organisasi ini memberikan layanan lisensi hak cipta, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada penulis dan melindungi kepentingan anggota. Organisasi ini telah banyak melaksanakan misi, beberapa diantaranya telah berhasil mencapai hasil yang baik contohnya VCPMC. Hingga akhir 2011, VCPMC telah mengumpulkan jumlah royalti sekitar 101 miliar VND.

Dengan adanya TPP kantor hak cipta Vietnam (COV) berangsur-angsur meningkat. Kantor ini memiliki empat divisi yaitu : Divisi Administrasi Umum, Divisi Hak Cipta, Divisi Hak Terkait dan Divisi Informasi. Terdapat pula dua kantor perwakilan di bagian selatan dan tengah negara, satu di kota Ho Chi Minh dan satu lagi di kota Da Nang. Situs web COV adalah alat penting bagi lembaga yang berwenang untuk mengarahkan dan memandu aktivitas hak cipta dan hak terkait agar sesuai dengan hukum. COV juga telah melakukan peningkatan khusus bagi pejabat dan pegawai negeri. Para staf kantor telah berpartisipasi dalam kursus pelatihan tentang teori politik, administrasi publik dan program pelatihan oleh *World Intellectual Property Rights (WIPO)* dan organisasi internasional lainnya agar dapat meningkatkan pelayanannya terhadap HAKI. Sebagaimana besar staf kantor dapat berbahasa Inggris dengan lancar, beberapa orang dapat berbicara dua bahasa asing. Para staf juga telah berpartisipasi dalam delegasi negosiasi dari pemerintah tentang hak cipta. Sekitar 30% total staf memiliki gelar pasca sarjana. Kantor Hak Cipta Vietnam (COV) ini telah memainkan peran penting dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan laporan tahunan BSA tahun 2007-2010 mengenai tingkat instalasi *software* tidak berlisensi berdasarkan kawasan terdapat perbandingan tingkat instalasi *software* tidak berlisensi pada enam kawasan berbeda dari tahun 2007 hingga 2010 tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembajakan menurun di kawasan Eropa Tengah atau Eropa Timur, Amerika Latin, Timur Tengah atau Afrika. Sedangkan pada kawasan lainnya cenderung fluktuatif sebanyak satu hingga tiga persen dan selebihnya tetap stabil. Pada tahun 2010 Asia Pasifik memiliki tingkat tertinggi pada instalasi *software* yang tidak berlisensi. Sedangkan pada kawasan lainnya terlihat tetap stabil.

Dengan adanya berbagai lembaga penegak hukum maka pembajakan *software* di Vietnam dapat turun pada tahun 2010. Studi ini menunjukkan bahwa tingkat pembajakan *software* menurun sebanyak 2% selama empat tahun dari 2007 hingga 2010. *The Business Software Alliance (BSA)* bekerjasama dengan *International Data Corporation (IDC)* menunjukkan data bahwa pada akhir 2007 terdapat lebih dari satu miliar komputer (PC)

terpasang di seluruh dunia dan hampir setengahnya menggunakan *software* tidak berlisensi atau bajakan. Menurut IDC total kerugian dari instalasi *software* bajakan meningkat sebanyak 8 miliar USD dari tahun 2006 hingga 2007. Sejak tahun 2007 hingga 2010 vietnam masuk ke dalam 25 peringkat negara dengan pembajakan *software* tertinggi. Dalam data tersebut terlihat bahwa vietnam dengan konsisten tingkat pembajakan *software* tahun 2007-2009 sebanyak 85% dan turun menjadi 83% pada tahun 2010.

Hal-hal yang disebutkan diatas ini dapat dikatakan kepatuhan terhadap rezim karena terdapat perubahan hukum yang disesuaikan dengan kelembagaan. Perubahan hukum tersebut dilakukan agar Vietnam dapat mengurangi tingkat pembajakan *software* di negaranya. Selain perubahan hukum terdapat pula organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam menangani masalah HAKI di Vietnam. Dengan adanya ketentuan hukum tersebut maka dapat dilihat tingkat pembajakan *software* di Vietnam pun turun menjadi 83% pada tahun 2010.

PENUTUP

Menurut penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa *Trans Pacific Partnership* (TPP) telah membangun rezim internasional yang secara khusus menjadi rezim dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual (HAKI). Vietnam sebagai negara berkembang memiliki tantangan pembangunan ekonomi yang cukup besar. Vietnam bergabung dalam TPP dan menerima persetujuan TRIPS sebagai bentuk komitmen bahwa negara ini siap untuk bekerjasama dalam perdagangan internasional dan menjaga hak kekayaan intelektual. Masuknya Vietnam dalam TPP merupakan langkah besar untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri menjadi terbuka. Menjadi anggota TPP mengharuskan Vietnam merubah segala sistem aturan hukum yang berkaitan dengan HAKI. Namun, dalam menyelaraskan regulasi TPP Vietnam mengalami kendala yang cukup besar dalam memberlakukan standar perlindungan bagi hak kekayaan intelektual.

Penegakan hukum di Vietnam masih cenderung lemah. Mengapa dikatakan demikian, karena masih banyak terjadi kasus pelanggaran akan hak kekayaan intelektual. Misalnya *software* meskipun tingkat pembajakan *software* mengalami penurunan pada tahun 2010 namun pada tahun-tahun selanjutnya pembajakan ini masih tetap ada. Yang lebih disayangkan lagi adalah kasus tersebut tidak hanya berasal antara aktor lintas negara, namun juga para aktor domestik. Hal ini membuktikan bahwa Vietnam masih sulit menegakkan hukum yang tegas bagi kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Terlebih TPP memiliki standar yang tinggi dalam perlindungan HAKI.

Melihat perbandingan regulasi yang dibuat oleh Vietnam sebelum dan sesudah bergabung dalam TPP. Terdapat sebuah kesimpulan bahwa Vietnam telah berupaya keras untuk menjadi anggota TPP dibuktikan dengan komitmennya terhadap regulasi yang dibuat pada masa transisi. Hal ini merupakan suatu kepatuhan Vietnam terhadap rezim TPP. Namun setelah Vietnam resmi diterima sebagai anggota, perlindungan dan penegakkan hukum yang seharusnya lebih ditingkatkan justru semakin ditinggalkan. Hal ini akhirnya yang membuat Vietnam harus menerima konsekuensi terhadap tantangan yang harus dihadapi oleh Vietnam yaitu pemberlakuan regulasi yang baik dan upaya penegakkan hukum yang tegas untuk menindak dan mencegah kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Referensi

Bainbridge, D. L. (1993). *Komputer dan Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Copyright Office of Vietnam. (t.thn.). *Acivities of the Copyright Office*. Dipetik Juli 14, 2018, dari http://www.cov.gov.vn/cbqen/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=74

- Fergusson, Mcminimy, & Williams. (2015). The Trans-Pacific Partnership (TPP) Negotiation and Issue for Congress. *Congressional Research Service* .
- LEMHANAS RI. (2013). Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership Guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam Rangka Ketahanan Regional. *Jurnal Kajian LEMHANAS RI* , 63.
- Kuriyama, C. (2012). *The Trans-Pacific Partnership : A Quest for a Twenty-First Century Trade Agreement*. New York: Cambridge University Press.
- Linh Thi Mai Nguyen, T. &. (2017, November 1). *Copyright Litigation in Vietnam : Overview*. Dipetik July 14, 2018, dari Thomson Reuters Practical Law: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-5773?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-011-5773?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1)
- Mearian, L. (2001). *Survey: Software Piracy Rates Remain High*. Dipetik Maret 11, 2016, dari https://www.computerworld.com.au/article/48159/survey_software_piracy_rates_remain_high/
- National Office of Intellectual Property of Vietnam. (t.thn.). *National Office of Intellectual Property of Vietnam Overview*. Dipetik Agustus 30, 2017, dari [http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/\(agntDisplayContent\)?OpenAgent&UNID=0D8A6AF608481DBF4725767F00217813](http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=0D8A6AF608481DBF4725767F00217813)
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vietnam Breaking News. (2016, October 25). *Vietnam PC Software Piracy Rate Falls Down*. Dipetik April 20, 2018, dari <https://www.vietnambreakingnews.com/2016/10/vietnam-pc-software-piracy-rate-falls-down/>